

MULTIKULTURALISME DALAM PERSPEKTIF SEJARAH SOSIAL¹

Oleh: Prof. Dr. Wasino, M.Hum².

A. Pendahuluan

Sejak Indonesia merdeka para pendiri bangsa ini telah dengan cerdas memikirkan antara realita dengan harapannya. Realitasnya Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang tunggal, tetapi bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan kepercayaan, bahasa, dan paham politik politik yang dianut. Dalam sebuah kebinekaan itu maka diharapkan akan terjadinya persatuan untuk mencapai bangsa yang kuat dan mampu menyejahterakan rakyatnya. Jejak sejarah pemikiran ini tercermin dalam pita yang dicengkeram oleh Lambang Negara Indonesia Burung Garuda.

Konsep *Bhineka Tunggal Ika* berjalan tidak selalu sepadan. *Bhineka* memang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan berlangsung hingga kini. Sementara konsep "*Ika*" merupakan sebuah harapan yang masih harus diperjuangkan. Sejak Indonesia merdeka hanya sebagian kecil elemen Bangsa Indonesia yang telah berpikir Keikaan Indonesia, terutama para tokoh pergerakan nasional dan pejuang kemerdekaan. Sehubungan dengan hal itu dalam sejarah Indonesia ada usaha-usaha menyebarkan KelIndonesiaan sebagai bangsa yang satu melalui berbagai cara. Pada masa Pemerintahan Sukarno hingga Suharto di sekolah-sekolah secara khusus diajarkan tentang pentingnya makna "*Bhineka Tunggal Ika*" ini. Sosialisasi pemikiran tersebut menjadi tugas mata pelajaran sejarah dan Pendidikan Kewarganegaraan. Akibat proses sosialisasi ini pemikiran tentang kebangsaan Indonesia diperkirakan makin bertambah orang di bumi Nusantara yang memahami dan meresapi diri sebagai Bangsa Indonesia.

¹ Makalah dalam Seminar Multikulturalisme dan Integrasi Bangsa dalam Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata di Semarang pada Hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

² Guru Besar Sejarah Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Dalam kehidupan masyarakat global seperti sekarang pemikiran para pendiri republik justru sangat relevan. Ada semacam revitalisasi dan modifikasi peikiran atas penghargaan kebhinekaan dalam bentuk penghargaan terhadap perbedaan budaya. Multikulturalisme sebuah paham dari luar yang dapat bersilang budaya dengan paham kebhinekaan dari para pendiri republik ini sehingga akan melahirkan masyarakat madani yang demokratis, menghargai hak asasi manusia berikut budayanya.

B. Indonesia sebagai Masyarakat Majemuk Warisan Kolonial

Ketika Indonesia merdeka masyarakatnya merupakan warisan kolonial yang dikenal sebagai masyarakat majemuk. Masyarakat ini sebagai warisan sejarah sebelum kemerdekaan, yakni sejak zaman Hindia Belanda. Masyarakat majemuk ketika itu didefinisikan oleh Furnivall (1944) sebagai masyarakat yang terdiri atas dua elemen atau lebih yang hidup sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik. Sebagai masyarakat majemuk, Indonesia dipandang sebagai tipe masyarakat daerah tropis di mana antara yang memegang kekuasaan dan mereka yang dikuasai memiliki perbedaan ras. Klas penguasa merupakan minoritas, orang-orang Belanda, dan yang dikuasai terdiri dari sejumlah ras yang berbeda. Rakyat bumiputera yang merupakan penduduk mayoritas menempati strata bawah dan menjadi warga negara kelas tiga di negerinya sendiri. Sementara itu etnis Cina merupakan kelas menengah terbesar di antara orang Timur asing lainnya (Arab, India).

Konsepsi Furnivall itu tentu sudah tidak mutlak relevan lagi dengan kondisi masyarakat majemuk Indonesia pasca kemerdekaan, apalagi dengan kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini. Hal itu dapat dilihat dari perwujudannya yang kongkrit seperti tiadanya ras minoritas yang menguasai ras mayoritas.

Meskipun begitu, menurut Nasikun (1985:35), konsepsi Furnifall itu masih ada kontinuitasnya pada saat ini. Dengan mengabaikan perwujudannya yang bersifat kongkrit kita dapat menangkap esensi konsepsi tersebut terlepas dari ruang dan waktu. Suatu masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat dengan sistem

nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain.

Masyarakat dikatakan bersifat majemuk apabila secara struktural memiliki sub-sub yang bersifat *diverse*. Masyarakat demikian ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai atau konsensus oleh seluruh anggota masyarakat, oleh berkembangnya sistem nilai dari kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya. Para anggota kesatuan-kesatuan sosial itu menganut sistem nilainya dengan kokoh dalam bentuknya yang relatif murni. Dalam situasi ini sering ditandai dengan konflik-konflik sosial, atau setidaknya tidaknya oleh kurangnya integrasi dan saling ketergantungan di antara kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagiannya.

Secara lebih tegas konsepsi masyarakat majemuk demikian telah dikemukakan oleh Geertz (1963:105-157) sebagai suatu masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, dan masing-masing terikat ke dalam *ikatan primordial*. Ikatan primordial merupakan ikatan yang berasal dari unsur "bawaan". Ikatan ini diartikan sebagai perasaan yang lahir dari "yang dianggap ada" dalam kehidupan sosial. Ikatan itu meliputi hubungan darah; hubungan keluarga, kerabat, atau kesukuan, kesamaan ras atau jenis bangsa, kesamaan bahasa atau dialek tertentu, ikatan kedaerahan atau regionalisme, ikatan keanggotaan agama atau aliran agama tertentu, dan bahkan kebiasaan-kebiasaan sosial tertentu (Geertz dalam Sudarsono, 1985:5-7).

Ikatan primordial itu memiliki kekuatan yang memaksa dan sering mengorbankan rasionalitas. Orang yang terikat pada anggota keluarga, suku, atau agama tertentu bukan karena keserasian hubungan pribadi, kebutuhan praktis atau kewajiban yang dibebankannya tetapi karena sedikitnya bobot yang lahir dari ikatan itu sendiri.

Secara sosiologis, masyarakat majemuk memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan masyarakat yang non majemuk (*homogen*). Menurut Piere L van den Berghe (dalam Nasikun, 1987:36). sejumlah karakteristik masyarakat

majemuk adalah : (1) terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain: memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga yang non komplementer: (3) kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar; (4) secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain; (5) secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coersion*) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi; serta (6) adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain.

C. Menghargai Kebudayaan Lain sebagai Basis Multi Multikulturalisme

Secara etimologis, multicultural berasal dari kata multicultural dan isme. Kata multicultural memiliki makna multi atau banyak budaya. Sementara itu tambahan (sufiks) isme memiliki makna ideologi, paham atau aliran. Dengan demikian dari pemaknaan ini berarti multikulturalisme memiliki makna ideologi atau paham tentang multi budaya.

Berdasarkan makna harfiah itu, maka pemahaman utama terhadap konsep ini harus berangkat dari budaya yang beragam. Sementara itu pengertian kebudayaan itu memiliki aneka ragam batasan atau konsep. Pada saat ini para ahli kebudayaan banyak yang bersilang pendapat tentang definisi kebudayaan. Perbedaan itu bukan sekedar masalah rumusan, tetapi sudah sampai pada tataran konseptual. Perbedaan konseptual ini membawa implikasi pada definisi operasional bagi peneliti kebudayaan. Tylor (1871) memberikan batasan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat-istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Ralph Linton (1940) memberikan definisi yang agak dekat dengan Tylor, kebudayaan sebagai keseluruhan pengetahuan, sikap, dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat. Koentjaraningrat (1978/79) mengatakan bahwa kebudayaan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Kebudayaan terdiri

atas unsur-unsur universal, yaitu : bahasa, teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian. Koentjaraningrat juga memerinci kebudayaan atas tiga wujud, yakni : ideal, aktifitas, dan benda budaya.

Beberapa batasan kebudayaan itu menunjukkan betapa kompleksnya konsep kebudayaan. Begitu kompleksnya hingga tidak memberi ruang bagi peneliti lain untuk memasuki bidang kajiannya. Dewasa ini konsep kebudayaan demikian mendapat kritik dari kalangan ilmuwan budaya sendiri, karena sangat sulit bagi mereka harus meneliti kebudayaan dalam kearangka konsep semacam itu.

Kebudayaan dan masyarakat dipandang sebagai sistem. Masing-masing memiliki jangkauan pengertian sendiri-sendiri. Kebudayaan mengacu pada hal-hal yang bersifat abstrak berupa sistem nilai, gagasan, kepercayaan, simbol-simbol, ideologi yang dibayangkan oleh suatu komunitas atau masyarakat tertentu. Komunitas itu bisa berupa sekumpulan manusia yang hidup menetap pada clan-clan kecil hingga sebuah kumpulan besar manusia yang hidup dalam wilayah yang lebih luas yang disebut suku bangsa atau bangsa.

Goedenoegh (dalam Keesing,1989:68) mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan pola (pattern) kehidupan dari suatu masyarakat – kegiatan dan pengaturan material dan sosial yang berulang secara teratur yang menjadi ciri khas suatu kelompok tertentu. Dalam hal ini kebudayaan merupakan isi bagian dalam dari benda-benda dan peristiwa yang bisa diamati. Kebudayaan juga merupakan sistem pengetahuan dan kepercayaan yang digunakan sebagai pedoman dalam mengatur pengalaman dan persepsi mereka, menentukan tindakan, dan memilih alternatif yang ada.

Setiap masyarakat memiliki kebudayaan yang dijadikan pedoman dalam perilaku. Oleh karena dasar berpikir yang melatarbelakangi kebudayaan mereka berbeda-beda, maka wujud perilaku yang tampak dalam keseharian mereka juga tidak sama. Hal itulah yang mempengaruhi adanya multibudaya dalam masyarakat dunia, termasuk Indonesia.

Kebudayaan dibangun oleh kelompok-kelompok pendukungnya yang oleh karena perbedaan asal pendukung ini konsepsi dan tampilan kebudayaan akan berbeda-

berda. Ada beberapa kelompok pendukung budaya, yaitu: ras, agama, suku, jenis kelamin . tingkatan sosial, kekayaan, dan tingkat pendidikan .

Paham multikultural atau multikulturalisme menghargai perbedaan-perbedaan budaya yang lahir dari kelompok-kelompok pendukung budaya itu. Bentuk penghargaan adalah adanya toleransi antar mereka untuk menciptakan tatanana masyarakat dunia yang harmonis yang ditandai dengan penghargaan terhadap hak asasi dan martabat manusia tanpa pandang bulu.

D. Multikulturalisme, dari Dunia Politik ke Dunia Pendidikan

Dalam sejarahnya multikulturalisme semula merupakan perjuangan politik dari migran kulit hitam dari Afrika di Amerika untuk menuntut persamaan hak. Mereka menuntut untuk dihargai kebudayaannya, tidak harus sama dengan kebudayaan orang kulit putih yang beragama Kristen. Tuntutan itu juga berkembang dalam dunia pendidikan.

Sebagai sebuah ide, pendidikan multikultural dibahas dan diwacanakan pertama kali di Amerika dan negara-negara Eropa Barat pada tahun 1960-an oleh gerakan yang menuntut diperhatikannya hak-hak sipil (civil right movement). Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk mengurangi praktik driskriminasi di tempat-tempat publik, di rumah, di tempat-tempat kerja, dan di lembaga-lembaga pendidikan, yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Selama itu, di Amerika dan negara-negara Eropa Barat hanya dikenal adanya satu kebudayaan, yaitu kebudayaan kulit putih yang Kristen. Golongan-golongan lainnya yang ada dalam masyarakat-masyarakat tersebut dikelompokkan sebagai minoritas dengan pembatasan hak-hak mereka (Suparlan, 2002: 2-3).

Gerakan hak-hak sipil ini, menurut James A. Bank (1989: 4-5), berimplikasi pada dunia pendidikan, dengan munculnya beberapa tuntutan untuk melakukan reformasi kurikulum pendidikan yang sarat dengan diskriminasi. Pada awal tahun 1970-an muncullah sejumlah kursus dan program pendidikan yang menekankan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan etnik dan keragaman budaya (*cultural diversity*).

Selain alasan politik ada sejumlah alasan mengapa pendidikan multikultural diperlukan. *Pertama*, Muncul gerakan reformasi pendidikan di AS dan perubahan masyarakat menuntut adanya integrasi sekolah-sekolah negeri yang memasukkan para siswa dari berbagai kalangan etnis. *Kedua*, Peningkatan populasi imigran memberi dampak pada lembaga-lembaga pendidikan. Protes terhadap penyamaan pendidikan, tanpa menghiraukan variasi budaya antar etnik. *Ketiga*, keberadaan masyarakat dengan individu-individu yang beragam latar belakang bahasa dan kebangsaan (*nationality*), suku (*race or ethnicity*), agama (*religion*), gender, dan kelas sosial (*social class*). Keragaman latar belakang individu dalam masyarakat tersebut berimplikasi pada keragaman latar belakang peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan (James A. Bank, 1989: 14).

Dalam sejarah pendidikan multikultural terdapat empat fase yang dilalui, yaitu:

1. upaya mempersatukan kajian-kajian etnis pada setiap tingkat kurikulum
2. pendidikan multi etnis sebagai usaha untuk menerapkan persamaan pendidikan melalui reformasi keseluruhan pendidikan
3. kelompok-kelompok marjinal lain; seperti perempuan, orang cacat, homo, lesbian, menuntut perubahan-perubahan dalam pendidikan
4. perkembangan teori, riset, dan praktek, perhatian hubungan antar ras, kelamin, dan kelas: menghasilkan tujuan bersama para teoritis dan pendidik.

Tujuan dari semua tahap pendidikan multikultural tersebut adalah penghargaan terhadap perbedaan budaya. Semua murid apapun asal ras atau etnis, kecacatan, kelamin, kelas sosial dan orientasi seksualnya akan dapat menikmati pendidikan yang sama.

E. Dari Pluralisme ke Multikulturalisme, Silang Budaya Sejarah Nusantara

Sejarah Nusantara yang kemudian berubah menjadi sejarah Indonesia menunjukkan adanya kontinuitas adanya silang budaya. Itulah sebabnya dalam kasus Jawa dengan cerdas Denys Lombard (terjemahan PT Gramedia, 2000) sekali menulis buku yang diterjemahkan Nusa Jawa dalam Silang Budaya. Dalam konteks ini sesungguhnya sejarah Indonesia tak pernah sepi dari hubungan antar etnis, antar ras yang membawa kebudayaan yang berbeda-beda,

Sejak zaman Indonesia klasik yang mencapai titik puncaknya zaman Majapahit, Nusantara telah dihuni berbagai etnis dan ras yang saling berinteraksi dengan membawa budayanya sendiri. Tentu yang menjadi etnis dominan adalah orang Jawa dengan kebudayaan Hindhu menjadi budaya dominan. Akan tetapi ketika itu tidak terjadi suatu pemaksaan kehendak dari etnis dominan kepada etnis minoritas yang beragama bukan Hindhu. Dari sejumlah catatan menunjukkan bahwa banyak etnis yang hidup di wilayah Majapahit seperti Cina, Arab, Persia, dan India yang sebagian besar beragama Islam. Mereka tinggal di wilayah pesisir pantai utara Jawa yang kemudian melahirkan pusat ekonomi dan pusat kekuasaan Islam di tanah Jawa. Dengan demikian ada pluralisme dalam kehidupan masyarakat Majapahit ketika itu.

Ketika Islam masuk di tanah Jawa dan menggantikan dirinya sebagai penghasil budaya dominan, hubungan antar etnis dan ras masih terus berlangsung. Kesultanan Malaka yang merupakan salah satu pusat kekuasaan Islam terpenting di Nusantara menjadi simbol masyarakat multi etnik. Tome Pires seorang Pelancong bangsa Portugis dalam tulisannya "*Suma Oriental*" mencatat bahwa di Kota Malaka terdapat 80 bahasa yang digunakan oleh para pedagang dalam berinteraksi. Bahasa sebagai identitas budaya yang ada di wilayah ini mengindikasikan adanya bangsa-bangsa dari berbagai pendukung budaya yang multi etnik yang saling berinteraksi karena kepentingan yang sama, yaitu berdagang.

Di Jawa hubungan antar etnik pada masa perkembangan Islam juga masih terlihat. Di sepanjang pantai utara Jawa banyak sekali peninggalan sejarah baik berupa makam, tempat ibadah yang mengindikasikan hubungan antar etnik. Selain itu juga produk budaya seperti batik, seni tradisi yang menggambarkan adanya silang budaya antar antar etnik tersebut. Di Lasem masih terlihat sisa-sisa bangunan, seni batik yang menggambarkan adanya silang budaya antara etnis Tionghoa (Cina) dengan Jawa. Demikian pula yang terjadi dengan bekas Kesultanan Demak yang menyisakan peninggalan sejarah silang budaya antara Hinduisme, Konfusionisme, Jawaisme, dan Islam. Mereka hidup dalam sebuah hubungan antar etnis yang cenderung harmonis, tidak ada sebuah dominasi satu pendukung budaya dengan budaya lain, terjadi sebuah akulturasi antar budaya.

Hubungan multikultur yang harmonis menjadi terganggu pada masa Kolonialisme Belanda. Penguasa Belanda membawa budaya Barat sebagai simbol

dominasi. Kebudayaan Barat dipandang lebih super dibandingkan dengan budaya lain dari timur, terutama dari penduduk bumiputra. Tugas mereka melakukan pemeradaban terhadap bangsa terjajah yang dianggap masih “tradisional”. Tugas ini sering dikenal sebagai “*white man burden*” yang bersumber dari tata cara hidup Barat dan kebetulan beragama Nasrani.

Meskipun jumlah penduduk kulit putih (terutama Belanda di Nusantara) tidak banyak, namun ideologi kekuasaan yang mereka pegang telah membuat budaya dominan adalah budaya Barat. Di luar budaya yang dianut oleh para penguasa terdapat banyak budaya yang dianut oleh penduduk yang dikuasai. Mereka berasal dari berbagai etnis dan tingkatan sosial. Situasi masyarakat seperti ini dinamakan sebagai masyarakat plural atau majemuk.

Konsep masyarakat majemuk untuk menamai keanekaragaman Indonesia berlangsung hingga Orde Baru. Pemerintah secara resmi mengakui hal itu dan menganut paham politik asimilasi kebudayaan dalam memecahkan persoalan etnisitas. Etnis minoritas diarahkan melakukan asimilasi terhadap etnis mayoritas. Hal ini terutama terjadi pada masyarakat etnis Tionghoa.

Pada masa Orde Baru, negara menjadi penafsir utama kebudayaan dengan meletakkan “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” atau disingkat “P4” sebagai simbol budaya tunggal. Sebagai sebuah pemikiran, konsep “P4” sesungguhnya merupakan sebuah tafsir budaya atas Pancasila oleh rezim Suharto merupakan sesuatu yang harus dihargai. Persoalannya adalah ketika tafsir itu kemudian dijadikan indoktrinasi dalam bentuk politik negara yang membuat semua pendukung budaya harus mengikuti tafsir tunggal tersebut. Dalam hal ini terjadi pengabaian terhadap multikulturalisme.

Tafsir budaya tunggal dalam bentuk indoktrinasi “P4” yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai “Jawanisasi” melahirkan perasaan perlawanan dari kelompok pendukung budaya lain. Perlawanan itu menjadi anti klimaks pasca lengsernya Suharto yang berdampak pada ancaman disintegrasi bangsa. Proses menyatukan cara berpikir ke dalam Indonesia sering menimbulkan problem-problem benturan budaya. Dominasi negara dan kelompok pendukung budaya dominan telah menafikkan keberagaman yang merupakan takdir Tuhan.

Realitas masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang multi etnik dengan penduduk sekitar 226 juta pada akhir Orde Baru, adalah sebuah masyarakat multikultural. Ada sekitar 300 etnis dan bahasa yang berbeda dalam hal ini kelompok "negara kepulauan terbesar di dunia" (lihat Adiwoso-Suprpto, 1982). Hal ini secara kasar diperkirakan bahwa pada pertengahan tahun 1980-an sekitar 82,2% dari penduduknya terdiri dari 14 kelompok etnis besar dengan lebih dari satu juta anggota, dan bahwa pada tahun 1986 sekitar 99,4% dari penduduknya adalah penganut dari empat agama utama dunia: Islam (86,9 %), Protestan (6,5%), Katolik (3,1%), Hindu, (1%) dan Buddha (0,6%. lihat Liddle, 1997:275). Hal ini juga multikultural dalam arti bahwa pedesaan tradisional, pesisir dan masyarakat suku hidup berdampingan dengan masyarakat kota metropolitan yang juga termasuk multikultural yang berorientasi pada global pasca-modern atau budaya modern.

Di sejumlah tempat keragaman budaya penduduk, lebih jauh lagi, pada kenaikan akibat migrasi. Faktor-faktor seperti migrasi antar pulau (termasuk migrasi karena dimasukkannya wilayah baru pada tahun 1962 dan 1976), migrasi pedesaan-perkotaan, di-migrasi pekerja asing di belakang investasi dan bantuan asing, antar perdagangan dan pariwisata nasional, dan kedatangan orang asing yang terlantar akibat perang di timur Selatan Asia dan Timur Tengah telah menyebabkan semakin etnis, agama, dan keanekaragaman ras dan pergeseran dalam komposisi etnis dan agama penduduk di daerah. Peningkatan heterogenitas dalam komposisi penduduk daerah-daerah lain sering menyebabkan sengit ekonomi, politik, dan friksi sosial, kompetisi, dan konflik bahkan mematikan.

Sejak Orde Baru hingga reformasi telah terjadi kekerasan yang berlebel etnik dan agama. Kekerasan terjadi pada aras komunal maupun kekerasan negara telah ciri permanen masyarakat Indonesia. Colombijn dan Lindblad (2002) mengatakan bahwa pada masa reformasi tingkat kekerasan semakin meningkat di Indonesia. Mengutip sejumlah sumber, mereka menunjuk pada berbagai kasus konflik bersenjata, genosida, pembunuhan, pembunuhan ekstra-yudisial, pembunuhan, decapitations, pemerkosaan, intimidasi, dan perusakan harta publik dan swasta dan pada fakta bahwa pada tahun 2001 ada 1,3 juta terdaftar pengungsi internal di Indonesia.

Kamanto Sunarto (2004) mengemukakan bahwa dampak pemberian hak otonomi kotamadya dan kabupaten sejak tahun 2000 telah juga menjadi sumber gesekan, tidak hanya antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dan kotamadya, tetapi juga antara lokal dan regional kelompok etnis dan agama. Sementara gerakan separatis bersenjata yang berlarut-larut terus mengancam integritas teritorial Indonesia, gerakan-gerakan lokal dan regional oleh kekuatan-kekuatan sosial mengarah pada pecahnya beberapa propinsi dan, sebagai konsekuensinya, peningkatan homogenitas etnis penduduk masing-masing propinsi baru. Perkembangan baru-baru ini muncul kekhawatiran bahwa peningkatan primordial provinsialisme dan lampiran lebih lanjut bisa melemahkan nasional Indonesia dan integrasi sosial.

Sehubungan dengan persoalan-persoalan primordialisme itu, maka konsep multikulturalisme menjadi isu penting untuk disebarluaskan di Indonesia. Hal ini penting karena pasca ambruknya rezim otoritarianisme Orde Baru menuju masyarakat demokratis harus didukung dengan tatanan masyarakat yang demokratis yang menghargai perbedaan paham budaya. Pemikiran ini sesungguhnya sebagai wujud revitalisasi dari pemikiran para pendiri bangsa menuju masyarakat Indonesia yang bersatu tanpa membedakan warna kulit, suku bangsa, agama, dan tingkatan sosial.

Multikulturalisme pada saat ini perlu disebarluaskan dalam khalayak yang lebih luas. Jalur-jalur mainstreaming dapat berupa lembaga politik, lembaga pendidikan, media masa, keluarga lembaga keagamaan, dan kepariwisataan. Melalui cara-cara tersebut akan dapat dicapai masyarakat Indonesia yang menghargai perbedaan budaya tanpa harus menimbulkan konflik-konflik sosial dan politik.

Hal ini penting karena perbedaan masih menjadi persoalan di Indonesia adalah masih adanya konflik-konflik berbasis perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (*SARA*). Kasus perusakan tempat ibadah oleh kelompok pendukung agama lain masih banyak terjadi di sejumlah tempat di Indonesia. Demikian pula konflik yang berbasis suku yang berbeda seperti di Sampit, Solo (Wasino, 2006), Aceh, dan lain sebagainya menunjukkan masih lemahnya pemahaman multikulturalisme.

F. Sosialisasi Multikulturalisme

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa masih sangat kurang pemahaman dan kesadaran multikulturalisme di kalangan anak bangsa di Indonesia. Sehubungan dengan hal itu penyebaran multikulturalisme perlu dilakukan. Selain politik multikultural yang musti dianut oleh pemerintah, pendidikan multikultural harus dilakukan kepada masyarakatnya.

Pendidikan multikultural tidak terbatas pada sekolah. Azra (2002) dan Saifuddin (2002) telah menunjukkan bahwa pendidikan multikultural adalah konsep yang luas, yang mencakup pendidikan formal, non-formal maupun pendidikan informal.

Sampai saat ini pendidikan multikultural masih dianggap oleh banyak orang sebagai isu yang kontroversial. Para kritikus memperingatkan bahwa pendidikan multikultural dianggap sebagai "adalah memecah-belah" (Aldridge, Calhoun dan Aman, 2000), "memupuk kultus etnisitas, merusak kebudayaan umum, mengarah ke Menara Babel, mendistorsi sejarah dan merongrong kesatuan sosial" (Parekh, 2002: 230) atau bahwa tidak kompatibel dengan nasionalisme (Watson, 2000:39).

Meskipun banyak yang berpandangan pesimistik terhadap keberhasilan pendidikan multikultural namun, realitas sejarah menghendaki implementasinya agar hubungan antar pendukung budaya dapat berlangsung baik. Melalui cara itu maka akan terjadi perubahan pemahaman dan kesadaran multikulturalisme yang akan menciptakan masyarakat yang toleran meskipun berbeda budaya.

Pendidikan multikultural dimulai dari politik pendidikan yang tercermin dalam undang-undang pendidikan dan peraturan-peraturan pemerintah yang dilahirkannya. Dalam tataran yang lebih rendah kurikulum lembaga pendidikan harus diolah sedemikian rupa sehingga memungkinkan memasukkan aspek multikulturalisme dalam lembaga pendidikan. Sosialisasi dan enkulturasi dilakukan dengan mengembangkan sebuah sistem di sekolah yang menghargai perbedaan. Sementara itu bahan-bahan ajar dibuat sedemikian rupa sehingga melahirkan pemahaman tentang multikulturalisme. Dominasi nama dari etnis tertentu atau agama tertentu untuk pelajaran umum harus diubah menjadi lebih beragam.

G. Penutup

Multikulturalisme merupakan konsep baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia, meskipun esensinya pernah menjadi pemikiran para pendiri bangsa. Akibat kurangnya pemahaman multikultural tersebut persoalan hubungan antar ras, etnis, agama, dan antar golongan dalam masyarakat Indonesia sering diwarnai hubungan yang kurang harmonis didasarkan pada ikatan primordial. Hal ini sering menimbulkan sikap *intolerance* dan konflik-konflik sosial.

Mengingat masih kurangnya pemahaman tentang multikultural, maka perlu ada peningkatan pemahaman dan kesadaran multikultural. Pada tingkat makro harus ada kemauan politik pemerintah dan negara dalam menerapkan multikulturalisme. Pada tataran mikro perlu adanya sosialisasi pemahaman dan kesadaran multikultural di semua lapisan masyarakat Indonesia, termasuk melalui dunia pendidikan formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwoso-Suprpto, 1982, "The Society and Its Environment", dalam Bunge, Frederica M. (ed.) *Indonesia: A Country Study*, Washington D.C: American University.
- Aldridge, J., C. Calhoun dan R. Aman, 2000, "15 Misconception about Multicultural Education", Focus on Elementary Volume 12 no. 13.
- Bank, James, A., 2002, *An Introduction to Multicultural Education*, Third, Edition, Boston-London-Toronto-Sydney-Tokyo-Singapore: Allyn and Bacon
- Cortés, Armando, 1967, *The Suma Oriental of Tome Pires* vo. 1, Reproduced by Permission of the Hakluyt Society from the Edition Originally Published by the Society 1944.
- Colombijn, F. dan J.T.Lindblad, , 2002, "Introduction" in Colombijn and Lindblad (eds), *Roots of Violence in Indonesia : Contemporary Violence in Historical Perspective*: Leiden: KITLV Press,
- Furnivall, 1944, *Netherlands India A Study of Plural Economy*, Cambridge University Press.
- Gabriel, Ralph H., 1991, *Nilai-nilai Amerika Pelestarian dan Perubahan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Geertz, Clifford, 1981, *Abangan Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pusaka Jaya.
- Keessing, Roger, M., 1989, *Antropologi Budaya*, Suatu Perspektif Kontemporer, Jakarta: Airlangga.
- Koentjaraningrat, 1978/79, *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru.
- _____, 1987, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta Gramedia
- Liddle, R.W., 1997, "Coersion, Co-optation, and Management of Ethnic Relations in Indonesia", dalam Brown dan Ganguly (eds.), *Government Policies and Ethnic Relations in Asia and the Pacific*.

- Linton, Ralph, 1940, 1940, "acculturation" dalam Linton (ed), *Acculturation in seven American Indian Tribes*, Gloucester, Mass: Peter Smith.
- Lombard , Denys, 2000, *Nusa Jawa Silang Budaya* (terjemhan 3 jilid), Jakarta: Gramedia.
- Mahfud Choirul, 2006. *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasikun, 1985/1987, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta; CV Rajawali.
- Parekh, Bhikhu 2008, *Rethinking Multikulturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik* (terjemahan), Yogyakarta: Impulse.
- Sunarto, Kumanto, Russel Hiang-Khng Heng, dan Achmad Fedyani Saifudin (eds.), 2004, *Multicultural Education in Indonesia and Southeast Asia Stepping in to the Unfamiliar*, Depok: Jurnal Antropologi Indonesia.
- Saifuddin, A.F., 2002, *Multicultural Education: Translating Idea into Action : Proceedings of the 3rd International Symposium of the Journal Antropologi Indonesia*: Udayana University, Denpasar: Bali.
- Sudarsono, Juwono (ed), 1985, *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik, Sebuah Bungai Rampai*, Jakarta Gramedia.
- Suparlan, Parsudi, 1989, *Interaksi antar Etnik di Beberapa Propinsi di Indonesia* , Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- _____, 2002, "Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia", Depok: *Jurnal Antropologi Indonesia*, no.6.
- Tylor, E.B., 1871, *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology*, Philosophy, Berkeley, Calif: University of California Press.
- Wadson,C.W., 2000, *Multiculturalism*, London : Open University.
- Wasino, 2006, *Wong Jawa dan Wong Cina Liku-liku Hubungan Sosial antara Etnis Jawa dan Tionghoa di Surakarta*, Semarang: Unnes Press.